

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Pengertian Strategi Komunikasi Politik

Strategi merupakan suatu bentuk pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan suatu perencanaan, gagasan, dan cara-cara tertentu dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pada penggunaan strategi yang baik terdapat suatu koordinasi tim kerjasama yang memiliki tugas untuk menentukan faktor pendukung dalam strategi yang digunakan secara efektif dan rasional dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹ Penggunaan strategi yang baik dapat membantu mengurangi dampak negatif yang tidak diinginkan dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Sedangkan menurut peneliti strategi rencana secara menyeluruh dengan menggunakan cara-cara yang berurutan agar proses dapat dijalankan secara sistematis. Bagi anggota partai strategi tidak hanya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun juga untuk mendapatkan dukungan sosial yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Sehingga pada akhirnya strategi merupakan sarana utama untuk menjalankan suatu organisasi ataupun perusahaan, agar dapat lebih baik kedepannya.

Komunikasi adalah suatu proses dari seseorang atau lebih kepada orang lainnya (pendengar) untuk menyampaikan suatu hal dengan tujuan dapat mengubah perilaku pendengar sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicara. Selain itu komunikasi merupakan sarana pengalihan suatu informasi agar dapat melakukan koordinasi makna antara pembicara dengan khalayak umum. Apabila dilihat secara harfiah, komunikasi politik berasal dari dua kata, yakni komunikasi dan politik, istilah komunikasi dalam bahasa inggris berasal dari kata latin yang berbunyi communication bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Sedangkan untuk kata politik berasal dari bahasa Inggris yang berbunyi *politic*, berarti pribadi atau sifat perbuatan (*adjective of action*) dalam kalimat bahwa politik bertindak bijaksana (*acting wisely*) dan bijak (*wise*).²

¹ Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19.

² Onong U. Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Rosdakarya: Bandung,2002), cet. XVII h. 9.

Apabila ditinjau secara etimologis, makna penggunaan kata politik dapat diartikan sebagai siapa yang memperoleh apa, kapan diperoleh, dan bagaimana proses atau cara memperoleh yang diinginkan. Politik itu sendiri merupakan suatu ilmu kenegaraan atau tata negara, suatu ilmu yang memiliki tujuan berpikir untuk mendapatkan kekuasaan. Maka dari itu tidak heran Apabila kata politik sering pula memiliki kaitan dengan kekuasaan, sedangkan komunikasi politik adalah alat atau sarana berupa pembicaraan yang bertujuan untuk mendorong pendengar agar mendukung pembicara mendapatkan kekuasaan yang diinginkannya.³

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, kata politik memiliki berbagai macam makna dapat berupa ilmu pengetahuan terkait ketatanegaraan, urusan dan tindakan berupa suatu kebijakan ataupun siasat yang terkait dengan pemerintahan. Dalam referensi lain, kata politik sendiri berasal dari bahasa latin "*politicus*" atau bahasa yunani (*Greek*): yang embrionya adalah kata polis yang berarti negara kota. Kata politik dalam ilmu tata bahasa juga dapat dikenal dengan kata sifat yang memiliki arti bahwa politik adalah tipe muslihat, tindakan akal, kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selain itu Soelistiani Ghani sebagai pencipta buku Pengantar Ilmu Politik memberikan dua pengertian terkait kata politik yang penting sebagai berikut:⁴

- 1) Politik dijadikan sarana untuk dimanfaatkan dalam menunjukkan suatu bentuk lain dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang terkait dengan kekuasaan atau power relationship di mana terkadang mayoritas isi dari politik dapat diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan kekuasaan.
- 2) Politik dapat dimanfaatkan sebagai suatu sarana untuk menunjukkan terhadap satu rangkaian tujuan yang ingin dicapai, atau dengan penjelasan yang lebih singkat dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan dalam kebijakan.

Menurut Deliar Noer sebagai pendiri Partai Umat Islam, menjelaskan bahwa politik merupakan suatu bentuk aktivitas atau sikap perilaku yang memiliki hubungan dengan kekuasaan. Maksudnya adalah politik sebagai sarana untuk mempengaruhi suatu jalan dengan cara mengubah atau mempertahankan bentuk susunan masyarakat yang telah ada dalam pemerintahan yang bersangkutan. Komunikasi politik merupakan suatu ilmu yang telah

³ Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Balai Pustaka: Jakarta, 2003), h.135.

⁴ Soelistiani Ghani, Buku Pengantar ilmu politik, (Balai Pustaka: Jakarta, 1995), cet ke.VII, h. 694.

melewati dua disiplin ilmu dalam bidang ilmu sosial, setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi.

Berdirinya perdebatan terkait komunikasi politik, telah menjadi suatu bukti bahwasanya komunikasi dan politik merupakan ilmu yang dapat saling terhubung. Kedua bidang kajian berupa komunikasi dan politik bergabung menjadi sub disiplin ilmu berupa komunikasi politik, yang melewati berbagai macam disiplin dan dikembangkan lebih dalam secara lintas disiplin. Pada umumnya komunikasi politik sudah ada sejak manusia melakukan suatu komunikasi dan kegiatan politik di wilayah masing-masing.⁵ Selain itu apabila dipelajari lebih dalam secara definisi, komunikasi adalah sarana utama yang mengatur kontrol sosial di masyarakat atau upaya untuk mempengaruhi masyarakat. Sehingga sesungguhnya hal tersebut telah mengandung makna politis, karena terdapat suatu aspek berupa mempengaruhi yang menjadi salah satu dari unsur utama kegiatan berpolitik.

Menurut seorang ahli politik yang bernama Dahlan lalu dikutip oleh Hafied Cangara melalui bukunya yang berjudul “Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi,”. Memberikan Penjelasan bahwa komunikasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin ilmu yang telah mendalami perilaku dan kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan politik, mempunyai akibat di dunia politik, tahu berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang. Di masa lalu komunikasi politik telah mengalami perkembangan yang bentuk awalnya berupa ilmu politik sesudah perang dunia pertama, walaupun Pada masa itu belum memakai penamaan tersebut.⁶ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah terlihatnya studi mengenai pendapat umum, propaganda manusia, dan berkembangnya suatu teori terkait media kritis sebagai bagian dari ilmu politik.

Komunikasi politik dapat tertuju pada pesan sebagai suatu objek yang bersifat formal, di mana konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada ilmu politik. Sehingga pada akhirnya komunikasi politik lebih berfokus pada komunikasi yang dilakukan dan bukan kegiatan pada politiknya atau berfokus pada pesan tentang politik. Maka komunikasi politik merupakan suatu bentuk

⁵ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Balai Pustaka: Jakarta, 2003), h. 13.

⁶ Cangara Hafied, “*Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 30.

komunikasi yang berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat dalam mencapai tujuan dalam berpolitik.⁷

Terdapat suatu relasi komunikasi politik yang memiliki hubungan antar Supra dan infrastruktur politik, apabila dapat dipetakan maka semua komponen yang memiliki kaitan dengan komunikasi politik akan dapat dipahami secara menyeluruh. Kondisi komunikasi politik di suatu wilayah akan dapat ditentukan oleh sistem politik yang dianut oleh wilayah tersebut. Sistem politik tersebutlah yang kemudian dapat membentuk suatu sistem komunikasi politik yang kondisinya tidak selalu sama dengan sistem politik yang digunakan.⁸

Strategi komunikasi politik adalah perencanaan lengkap dengan berisikan berbagai macam cara-cara runtut ataupun alternatif tertentu yang di pilih untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Pada proses tersebut akan menggunakan berbagai macam bentuk komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi dinamika politik yang sedang terjadi. Tren-tren politik pada masa kini, akan digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam ruang lingkup publik demi mencapai tujuan politik yang telah ditentukan. Pada umumnya komunikasi politik yang digunakan untuk pemilihan umum dapat berupa kampanye akbar, atau kampanye melalui media sosial yang lebih mudah untuk di akses oleh masyarakat.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan dengan melihat pendekatan strategi komunikasi politik yang menggunakan cara empiris membuat masyarakat dapat melihat berbagai macam komponen yang ada, sehingga hal tersebut lebih mendekati kenyataan terjadi dari suatu mekanisme komunikasi politik. Maka dari itu pengertian strategi komunikasi politik dapat disimpulkan sebagai suatu proses penyaluran lambang-lambang atau simbol komunikasi yang memiliki isi terkait pesan politik. Pesan tersebut bisa dari seseorang ataupun kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka cara berpikir baru, serta dapat mempengaruhi sikap ataupun tingkah laku yang menjadi target dari komunikasi politik yang dilakukan. Selain dari teori yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat teori lainnya yang membahas terkait komunikasi politik walaupun pada akhirnya semua teori tersebut

⁷ Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Refrensi Ilmiah-Politik, (Lintas Media: Jombang Edisi Millenium, 2010), h. 529.

⁸ Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media), (Rosdakarya: Bandung, 2003), h. 13.

secara garis besar, memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Komunikasi Politik Menurut Pandangan Islam

Komunikasi politik tidak hanya dapat dianalisis dari pandangan ilmu komunikasi dan ilmu politik saja, akan tetapi komunikasi politik dapat dianalisis melalui perspektif dari agama Islam. Pada buku komunikasi islam yang dibuat oleh Harjani Hefni menjelaskan bahwa komunikasi politik dalam agama islam merupakan komunikasi yang dibangun menggunakan prinsip-prinsip keislaman dimana mengandung roh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan menggunakan asas Qur'an dan Sunnah, komunikasi politik dalam Islam adalah komunikasi yang berusaha untuk membangun hubungan dari diri sendiri dengan Sang Pencipta serta dengan sesama manusia untuk mewujudkan kedamaian serta keselamatan kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan tunduk kepada perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa komunikasi politik dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas sebagai suatu praktik komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan terbentuknya pandangan yang sama terkait objek yang dikomunikasikan. Akan tetapi komunikasi politik Islam lebih dari itu, di mana komunikasi Islam berusaha untuk membentuk suatu komunikasi yang memiliki karakter diwarnai dengan nilai-nilai keislaman untuk mencapai suatu ruang lingkup yang berisi kedamaian, keramahan dan hubungan harmonis antar sesama manusia.

Agama Islam sebagai sebuah agama tidak hanya mengajarkan tentang aspek kehidupan manusia dalam beragama, akan tetapi juga mengajarkan urusan perpolitikan. Secara umum agama Islam tidak dapat dipisahkan dari urusan politik di dunia pemerintahan, hal tersebut disebabkan karena politik dalam suatu negara berkaitan dengan hajat hidup umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang ahli politik yang menjadi pemimpin di negara Madinah, dalam kehidupan beliau saat itu merupakan seorang kepala negara.¹⁰ Selain itu Nabi Muhammad SAW juga melakukan praktik komunikasi politik ala agama Islam yang dilakukan secara verbal maupun menggunakan suatu media. Hal tersebut dilakukan sebagaimana yang telah beliau praktikkan

⁹ Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 14.

¹⁰ Ubaidillah, Surat-surat Nabi Muhammad saw Kepada Para Raja (Analisis Wacana Model Van Dijk) Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2015, h. 11.

dalam mengirim surat kepada raja-raja yang berkuasa di sekitar kota Madinah dengan tujuan untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam.

Dalam kehidupan politik di Indonesia yang mayoritasnya agama Islam, sudah sewajarnya apabila aktivitas dari aktor tokoh politik Islam berkaitan erat dengan penggunaan komunikasi politik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Aktor politik Islam yang dimaksud bisa berupa orang Islam yang sejak awal merupakan seorang politisi murni di Indonesia, ataupun bisa jadi merupakan seorang tokoh agama yang memutuskan untuk ikut serta dalam dunia politik semisalnya seorang Kyai. Sebagai seorang tokoh agama yang ikut serta dalam dunia politik sudah sewajarnya apabila melakukan kegiatan berupa komunikasi politik. Komunikasi politik seorang Kyai tidak akan lepas dari perspektif agama Islam, hal tersebut disebabkan semua aspek kehidupan beliau sehari-hari tidak dapat lepas dari ajaran agama Islam yang telah dipelajari dan dipraktikkan.¹¹

Ajaran agama Islam selalu mengajarkan untuk menggunakan komunikasi yang beradab atau baik termasuk dalam penggunaan komunikasi untuk kepentingan politik. Dalam agama Islam terdapat model komunikasi Qaulan layyinan, yakni bentuk komunikasi yang menyentuh jiwa para pendengarnya dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an seperti berikut:

Surah an-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat ini menghimbau agar manusia dapat menepati janji ataupun sumpah-sumpah yang telah diucapkan oleh mereka, ketika kalian telah berjanji maka hendaklah untuk menepati janji yang diucapkan. Selayaknya para tokoh politik yang mengucapkan janji-

¹¹ Ihwan Huda Al-Mujib, Perspektif Islam dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur dalam Jurnal Nomosleca Volume 6 Nomor 1 2020, h.69.

janjinya ketika sedang berkampanye di ruang lingkup masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan capres-cawapres berhati-hati dalam melakukan komunikasi politik di khalayak umum. Selain itu ayat ini menjadi pembatas dan pengingat bagi mereka yang telah berani untuk bersumpah terutama menggunakan nama Allah SWT.

Model komunikasi politik yang dianjurkan oleh agama Islam adalah dengan menekankan pada penggunaan bahasa yang lemah dan lembut, suara yang enak didengar, dan ramah dalam penyampaian sehingga dapat menyentuh ke dalam hati para pendengar. Qaulan layyinan dapat membuat hati para pendengar untuk tersentuh dan menerima pesan komunikasi politik yang disampaikan dengan lapang dada. Maka tidak heran apabila di dalam agama Islam dianjurkan semaksimal mungkin untuk menghindari penggunaan kata yang kasar, intonasi suara yang tinggi, dan penggunaan kata yang menghasut.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas maka komunikasi politik yang digunakan oleh seorang tokoh agama akan lebih cenderung pada penggunaan komunikasi yang beretika atau yang Qawlan layyinan. Komunikasi politik yang digunakan merupakan suatu komunikasi yang memiliki tujuan untuk dapat menjalin hubungan antar sesama manusia dan ditujukan dalam rangka mencapai kemaslahatan umat Indonesia secara kolektif melalui jalur politik.

Akhlakul karimah merupakan suatu bentuk karakteristik yang khas berasal dari agama Islam dalam ruang lingkup komunikasi, di mana komunikasi politik versi agama Islam harus memiliki kaitan yang erat dengan sumber ajaran agama Islam berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu komunikasi Islam lebih menekankan penggunaan komunikasi yang diwarnai dengan perintah-perintah dalam agama Islam. Maksudnya adalah komunikasi politik versi Islam harus memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dalam rangka menyampaikan pesan kepada masyarakat dan tidak menggunakan bentuk penggunaan kata yang kasar ataupun menyinggung perasaan dari masyarakat yang menjadi pendengar.¹³

Dapat diambil kesimpulan menurut peneliti bahwa komunikasi politik dalam agama Islam akan mengharuskan penggunaan etika yang baik dalam berkomunikasi, sehingga memberikan bentuk perspektif yang lebih baik dalam komunikasi

¹² Hery Purwosusanto, Komunikasi Politik dalam Tafsir (Kajian Atas Tafhim Al-Qur'an Karya Abul A'la Al-Maududi) dalam Jurnal Tajdid Volume XV Nomor 2 2016, h. 67.

¹³ Abdul Rasid, Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami dalam Jurnal Ilmu Dakwah Volume 5 Nomor 2 2011, h. 648-649.

politik. Walaupun pada akhirnya komunikasi politik memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dalam dunia politik, namun apabila didasari dengan asas komunikasi Islam maka akan terhindar dari teks komunikasi politik yang buruk seperti saling menjatuhkan, timbul fitnah antar aktor politik, dan jauh dari nilai-nilai etika dalam agama Islam. Dengan terciptanya kolaborasi antara komunikasi Islam dan komunikasi politik dapat membentuk praktik komunikasi politik yang lebih santun dan menciptakan praktik politik yang beretika. Sehingga keputusan hasil musyawarah dalam dunia politik akan sangat dinantikan oleh masyarakat luas, terhindar dari berbagai macam permasalahan sosial masyarakat dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia.

3. Karakteristik seorang pemimpin yang mempengaruhi minat suara Gen Z

Gen Z merupakan suatu kelompok pemilih yang mungkin mayoritasnya yang baru memasuki usia memilih dan akan segera menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam pemilihan umum. Dengan masa pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan setiap lima tahun sekali, maka dapat diperkirakan untuk usia dari gen Z adalah 17 sampai 27 tahun. Pada umumnya kelompok dari gen Z berisikan orang-orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di suatu universitas, pekerja berusia muda, ataupun masyarakat yang baru lulus SMA. Pada umumnya, kelompok dari gen Z merupakan suatu kelompok yang bersifat pemilik strategis dikarenakan jumlah dari kelompok tersebut termasuk dalam jumlah mayoritas di pemilihan umum.

Selayaknya yang telah dijelaskan di dalam UU No. 10 tahun 2008 pada Bab 4 Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 yang memberikan penjelasan terkait Gen Z sebagai berikut: Gen Z merupakan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan atau lebih, sudah/pernah menikah yang mempunyai hak pilih, dan baru pertama kali memilih karena ketentuan UU Pemilu.¹⁴ Sebagai anggota kelompok yang mayoritas dalam pemilihan umum, Gen Z harus diberikan bekal berupa pengetahuan dan edukasi terkait dunia politik ataupun demokrasi dalam pemilihan umum. Sehingga ilmu politik kelompok tersebut cukup luas dan dapat menentukan calon pemimpin yang berkualitas untuk menjadi presiden 2024-2029 dalam menuju Indonesia emas.

¹⁴ Undang-undang, No 10 Tahun 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39037/uu-no-10-tahun-2008>.

Para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Pada umumnya Gen Z memiliki harapan, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda serta dinilai menantang bagi organisasi. Karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alamnya layaknya mereka bernafas.¹⁵

Seorang pengamat politik bernama Ryan Sugiarto menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minat suara Gen Z dalam pemilihan presiden yakni karakter personal yang dimiliki calon pemimpin berupa cerdas, sederhana, religius, dan tegas. Beberapa karakter tersebut merupakan kebutuhan seorang pemimpin yang layak untuk mengatur Negara Indonesia yang majemuk. Berikut ini penjelasan terkait faktor-faktor yang menentukan hak pilih suara Gen Z pada pemilihan presiden sebagai berikut:¹⁶

1) Karakteristik cerdas seorang pemimpin

Gen Z menyukai seorang pemimpin yang cerdas terutama berpikir kritis terlebih dahulu lalu membuat suatu keputusan atau suatu tindakan. Kecerdasan yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang fokus mempelajari suatu permasalahan secara kritis dan detail, agar tindakan dalam mengatasinya tidak menciptakan suatu kesalahpahaman. Pemimpin yang cerdas menurut gen Z adalah seseorang yang mengetahui cara terbaik untuk memahami sekaligus menyelesaikan persoalan bangsa sebelum mengambil keputusan. Selain itu memiliki kemampuan dalam menerima suatu informasi dengan cermat, detail, dan tepat merupakan syarat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin.

2) Karakteristik tegas seorang pemimpin

Ketegasan seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menjadi kepala negara di negara Indonesia yang penuh keanekaragaman budaya. Gen Z menyukai pemimpin yang

¹⁵ Wolfsfeld, G., Yarchi, M., & Samuel-Azran, T. (2015). Political Information Repertoires and Political Participation. *New Media & Society*, 18(9), 1–20.

¹⁶ Ryan Sugiarto, 1 April 2014. Karakteristik ideal seorang pemimpin bagi generasi muda, hal 221.

memiliki sikap tidak mudah terpengaruh dan teguh pendirian atas tindakan atau sikap yang dimiliki. Sehingga dapat mengelola masyarakat Indonesia yang beragam baik dari segi agama, budaya dan suku dengan stabil. Anak muda menyukai pemimpin yang tegas karena dengan sikap itu lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dan juga lebih mudah dalam mengatur bawahannya.

3) Karakteristik sederhana seorang pemimpin

Seorang pemimpin yang memiliki pola hidup sederhana merupakan bagian dari sifat atau karakteristik yang disukai oleh Gen Z. Pola hidup sederhana merupakan suatu ciri khas tertentu yang menyatakan bahwa pemimpin tersebut lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Selain itu pemimpin yang sederhana merupakan pemimpin yang mengetahui bahwa kedudukannya hanya sekedar sebagai pemimpin bukan pemilik. Maka dari itu kesederhanaan seorang pemimpin dapat mendekatkannya dengan kalangan anak muda.

4) Karakteristik religius seorang pemimpin

Karakteristik presiden atau pemimpin Nasional Indonesia harus memiliki karakter yang religius, hal tersebut disebabkan terdapat beraneka ragam agama yang diakui di Indonesia. Kepemimpinan yang religius merupakan suatu hal yang sangat penting di Indonesia karena dibutuhkan oleh masyarakat dan negara agar dapat menjaga amanah yang masyarakat berikan. Maka dari itu sudah seharusnya seorang pemimpin yang religius dapat menghindari suatu tindakan yang berbentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun korupsi. Besarnya kesadaran gen Z terhadap tingkat religius seorang pemimpin dapat menjadi sumber atas amanah yang diberikan oleh masyarakat terhadap seorang pemimpin. Selain itu perlunya pemimpin yang religius agar keanekaragaman agama di Indonesia dapat dijaga kedamaianannya dan meningkatkan tingkat toleransi beragama.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa terdapat 4 macam karakteristik yang dapat mempengaruhi minat suara Gen Z untuk menentukan seorang pemimpin. Karakteristik tersebut merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin apabila ingin mendapatkan banyak minat suara dari kalangan anak muda. Karena pentingnya karakteristik tersebut penulis juga menyimpulkan bahwa pentingnya diadakan edukasi atau sosialisasi politik terkait

karakteristik seorang pemimpin yang baik. Sudah sewajarnya Gen Z sebagai pemilih pemula di pemilihan presiden diajarkan dan diarahkan ke dunia politik yang baik dan benar. Sehingga dapat menciptakan pemilih Gen Z yang cerdas dan kritis dalam berpolitik agar dapat terhindar dari informasi hoax yang beredar.

4. Pemilu

Secara keseluruhan pemilihan umum merupakan suatu mekanisme terstruktur dari demokrasi dalam menentukan pergantian pemimpin dari pemerintahan di Indonesia. Pemilihan umum menjadi sarana untuk masyarakat dapat ikut serta secara langsung dalam menentukan wakil mereka di parlemen ataupun calon presiden dan wakil presiden yang terlaksana secara bebas, jujur, umum adil dan secara langsung.¹⁷

Selain itu Pemilu dapat dikatakan sebagai sarana mekanisme dalam demokrasi tidak langsung agar rakyat dapat memilih wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Wakil rakyat yang terpilih akan diwajibkan untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu hal yang mustahil untuk semua masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pemerintahan.¹⁸

Jurdi mengemukakan bahwa pemilu merupakan sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai:¹⁹

- a) Tata cara pendelegasian sebagian kedaulatannya oleh rakyat untuk peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah guna membuat dan menjalankan sebuah keputusan politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.
- b) Mekanisme perubahan politik mencakup pola dan arah kebijakan publik, dan sirkulasi elite, secara periodik dan tertib.
- c) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakatnya ke dalam sebuah lembaga legislatif dan eksekutif untuk membahas dan memutuskan secara terbuka dan beradab.

¹⁷ Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indon esia, (Yogyakarta: UGM, 2010), h. 72.

¹⁸ Moh. Mahmud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 60.

¹⁹ Jurdi, "analisis pemilihan umum dalam menarik minat suara anak muda". 2018, hal 2.

Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu aktivitas atau kegiatan politik, dimana pemilihan umum yang berlangsung adalah sarana untuk lembaga pemerintahan dalam melakukan praktik politik yang mewujudkannya terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Selain itu Pemilu merupakan suatu sarana untuk mewujudkan kehendak masyarakat dalam memilih wakil rakyat yang akan mewakili masyarakat dalam mendapatkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia berhak sebebaskan mungkin dalam berdemokrasi di pemilihan umum untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang dipercaya.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa pemilu ialah tempat kedaulatan rakyat di dalam memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan pada Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu harus mempunyai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu berguna untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, guna mewujudkan pemilu yang adil serta berintegritas, dapat menjamin konsistensi yang mengatur sistem pemilu, memberikan suatu kejelasan hukum serta dapat mencegah duplikasi di dalam pengaturan pemilu, dan terwujudnya pemilu yang efektif serta efisien.²⁰ UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan.²¹

Dalam negara Indonesia yang demokrasi pemilu adalah suatu sarana mewujudkan pergantian kekuasaan secara damai dalam 5 tahun sekali sesuai dengan ketentuan konstitusi yang telah

²⁰ Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

²¹ Undang-undang Politik 2003, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, h. 35.

ditetapkan. Ketentuan atau prinsip-prinsip yang dimaksud dalam pemilihan umum dapat berupa prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berdemokrasi, dengan ditandai adanya kebebasan warga negara Indonesia untuk berhak ikut serta secara aktif dalam Setiap kegiatan pemerintah.

Pemilu secara universal adalah pemilu adalah suatu alat yang dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi untuk membentuk suatu pemerintahan yang sah dalam mewujudkan kepentingan rakyat yang diwakilkan oleh orang-orang yang dipilih.²² Penjelasan di atas memberikan suatu kesimpulan bahwa pemilihan umum di Indonesia mengikutsertakan rakyat secara menyeluruh untuk ikut serta dalam penyelenggaraan yang diadakan oleh negara. Wakil rakyat yang terpilih memiliki kewajiban untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam suatu parlemen. Calon wakil rakyat yang terpilih atau memenangkan suara dalam pemilihan umum, memiliki kewajiban untuk secara maksimal mewujudkan dan memperjuangkan hak rakyat.

Melihat penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa presiden dan juga kepala daerah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana mereka dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Baik anggota legislatif kepala daerah, ataupun presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka sudah sewajarnya apabila mereka sebagai wakil rakyat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kekuasaan mereka masing-masing. Sudah seharusnya wakil rakyat harus ditentukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri, dengan cara melalui pemilihan umum agar wakil rakyat yang terpilih dapat benar-benar bertindak di dalam pemerintahan untuk kepentingan rakyat.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperjelas data dan memperlengkap bahan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Menyebabkan judul skripsi yang diajukan dapat semakin menarik untuk dipahami dan dipelajari lebih dalam lagi sekaligus mengikuti isu permasalahan terbaru di Indonesia. Selanjutnya penulis akan melakukan pengkajian data serta menguraikan beberapa buku ataupun literatur lainnya dan telah menjadi referensi yakni sebagai berikut:

²² Mochamad Febriansyah, “Sejarah PEMILU (Pemilihan Umum) Indonesia”, <http://diklikaja.com/sejarah-pemilu-di-indonesia.18> Mei 2024)

1. Buku yang dibuat oleh Syahril Syarbaini dengan judul Teori, Media, dan Strategi Komunikasi Politik yang diterbitkan pada bulan Juli 2021. Buku ini dibuat untuk memenuhi Program Ilmu Komunikasi ESA UNGGUL Press pada Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada buku ini akan membahas terkait teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang peneliti buat, teori yang dimaksud adalah strategi komunikasi politik. Secara lengkapnya teori strategi komunikasi politik terbagi menjadi dua sarana, komunikasi politik secara langsung dengan melakukan kampanye akbar ataupun tidak langsung dengan memasarkan diri di media sosial. Pada penelitian skripsi akan menggunakan teori yang dijelaskan oleh buku tersebut, sebagai sarana untuk menjawab rumusan masalah yang sedang terjadi. Teori-teori yang dijelaskan di buku tersebut juga akan digunakan untuk menyelesaikan bab empat pada bagian analisis untuk memastikan hasil wawancara, data di lapangan dan teori yang digunakan.
2. Skripsi yang dibuat oleh Naafilah Astri dengan judul Marketing Politik Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono Pada Pemilihan Presiden 2009 di Kota Surabaya. Naafilah Astri adalah seorang sarjana yang lulus dari jurusan peradilan agama di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Pada penelitian tersebut akan membahas terkait strategi marketing politik yang digunakan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam memenangkan pemilihan presiden tahun 2009. Strategi marketing atau komunikasi politik yang digunakan adalah dengan menekankan pada strategi mix marketing yang berfokus membahas prestasi dan pesan politik beliau Pada periode sebelumnya. Penelitian tersebut juga membahas terkait penggunaan komunikasi politik Susilo Bambang Yudhoyono dalam memenangkan pemilihan presiden pada masa itu. Sedangkan pada penelitian yang penulis bahas akan menjelaskan tentang strategi komunikasi politik dari pasangan capres cawapres pemilihan presiden 2024 nanti. Dengan menambahkan konsep segmentasi pasar, penentuan target, dan pengambilan posisi politik dalam Pilpres 2024.
3. Jurnal internasional yang dibuat oleh Stephen Coleman dengan judul Political Marketing: a Comparative Perspective, yang membahas terkait marketing politik yang digunakan oleh negara Inggris di pemilihan umum. Terdapat berbagai macam orientasi partai dalam komunikasi politik yang digunakan sebagai strategi berupa partai berorientasi produk, partai yang

berorientasi pasar dan partai yang berorientasi pada penjualan. Masyarakat di negara Inggris telah memiliki pola pikir untuk mempelajari situasi politik, sosial, ataupun budaya yang ada di negaranya. Sehingga komunikasi politik yang digunakan akan lebih berfokus untuk menguatkan Gagasan Politik para calon yang dapat dipahami dan dimengerti oleh konstitusi. Hal tersebut berbeda dengan objek penelitian pada penulis yakni masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki tipologi pemilih yang beragam. Sehingga diperlukannya pemahaman yang tepat dan detail terkait masyarakat Indonesia dalam menggunakan strategi komunikasi politik yang lebih beragam, karena kebutuhan dari masyarakat yang sangat beragam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Irfariati, penelitian ini membahas terkait sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai mantan prajurit TNI yang terjun ke dunia politik selayaknya Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan mantan prajurit TNI yang mencalonkan diri sebagai Cagub di DKI Jakarta 2017. Beliau merupakan orang yang pandai dalam beretorika dan memiliki kosakata yang luas sehingga komunikasi politik beliau sangat mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu beliau memiliki penggunaan kata ataupun kalimat yang tegas, efektif dan sopan dengan dilengkapi kalimat yang menggunakan makna konotasi melalui penyampaian visi dan misi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, sesuai dengan metode penelitian yang penulis buat dengan berjudul strategi komunikasi politik pasangan capres dan cawapres dalam menarik minat suara Gen Z pada pemilu 2024.
5. Skripsi yang telah ditulis oleh Herdina Rosidi dengan pembahasan mengenai perbandingan komunikasi politik yang digunakan oleh Fauzi Bowo dan Joko Widodo dengan keunikan dari diri mereka masing-masing sebagai Pasangan calon. Apabila dilihat dari Tipe orator yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Joko Widodo bertipe rethorically sensitive sedangkan lawannya yakni Fauzi Bowo bertipe noble selve. Selain itu pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif, sesuai dengan metode penelitian yang penulis buat dengan berjudul strategi komunikasi politik pasangan capres dan cawapres dalam menarik minat suara Gen Z pada pemilu 2024.

6. Jurnal internasional yang ditulis oleh Erwin Riduan dengan judul pembahasan “The Concept Of Political Communications In The Digital Era For A Wider Public Service”. Jurnal ini membahas terkait pemahaman dan praktik komunikasi politik Indonesia di era digital untuk menjelaskan dan memberikan pemikiran baru mengenai perkembangan konsep dan praktik komunikasi politik di era digital. Bagaimana fungsi dan proses komunikasi politik di era digital menjalankan perannya untuk menjangkau masyarakat luas, sehingga jaringan internet termasuk media sosial yang sudah dikenal masyarakat luas dapat dimanfaatkan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi literatur dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Temuan pemikiran, pemahaman, dan praktik komunikasi politik di era digital di Indonesia merupakan fenomena baru yang belum muncul pada era sebelumnya. Pemanfaatan internet dapat membantu praktik komunikasi politik menjadi lebih luas, tepat, dan tepat sasaran. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih berfokus terhadap respon Generasi Z dalam menerima gaya komunikasi politik pasangan capres dan cawapres di era digital.
7. Jurnal dengan judul “The political communication process among Chinese moslem society” yang dibuat oleh Ulfah Hidayati. Penelitian ini mengacu pada pemahaman bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang akan menghasilkan efek (dalam hal ini keputusan memilih). Dari penelitian tersebut diperoleh sumber informasi dominan yang digunakan untuk mengakses informasi politik adalah media massa (televisi dan koran), media komunikasi interpersonal, media komunikasi kelompok, dan sumber informasi lainnya seperti iklan luar ruangan. Informasi mengenai pasangan Jokowi Ahok menjadi informasi yang paling banyak didapat oleh warga. Keputusan memilih secara umum dipengaruhi oleh beragam faktor yaitu oleh media massa, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok/organisasi, dan melihat kondisi Jakarta secara langsung. Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah objek yang terfokus, pada penelitian ini membahas terkait Gen Z dalam menerima informasi komunikasi politik dari pasangan capres dan cawapres untuk menarik minat kelompok mayoritas.

Adapun perbedaan terkait penelitian yang menjadi tinjauan pustaka di atas dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah penggunaan komunikasi politik yang efektif dan efisien dari

capres dan cawapres dalam menarik suara atau minat Gen Z pada pemilu 2024 nanti. Besar harapannya dengan adanya beberapa tinjauan pustaka di atas, maka hasil penelitian yang dibuat oleh penulis dapat menjelaskan komunikasi politik secara Kredibel dan menyeluruh.

C. Kerangka Berpikir

Alur berpikir peneliti yang digunakan sebagai dasar-dasar pemikiran dalam rangka memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian biasanya disebut dengan kerangka berpikir. Apabila ditinjau pada penelitian kualitatif, diperlukannya Suatu bentuk landasan yang berfungsi menjadi dasar dari penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus atau terarah. Maka dari itu diperlukannya kerangka berpikir agar dapat membangun konteks dan konsep penelitian yang lebih berkualitas, sehingga dapat memperjelas suatu metodologi penelitian, penggunaan teori, dan memperjelas konteks pada penelitian tersebut. Dengan terbentuknya penjelasan yang tersusun akan dapat menggabungkan antara teori dengan rumusan masalah penelitian yang akan dibahas. Kerangka berpikir dapat terbentuk dalam suatu penelitian apabila penelitian tersebut memiliki kaitan dengan fokus penelitian.

Terbentuknya suatu alur penelitian yang tersusun rapi, jelas, dan dapat diterima oleh pembaca dapat tercapai dengan menggunakan kerangka berpikir (Sugiyono, 2017: 92). Suatu kerangka berpikir tidak hanya sekedar informasi yang didapatkan dari berbagai macam sumber dan juga tidak hanya sekedar suatu pemahaman tertentu. Akan tetapi kerangka berpikir memerlukan suatu hal yang lebih dari sekedar data ataupun informasi yang relevan dengan suatu penelitian, dalam suatu kerangka berpikir membutuhkan teknik pemahaman yang dapat memahami secara detail atas Sumber data yang dipakai, lalu dapat diterapkan dalam suatu kerangka berpikir seperti berikut:

Kerangka Berpikir

